



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menegaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi pemerintahan daerah.

Demikian juga, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan tentang perlunya pengintegrasian sistem akuntabilitas instansi pemerintah dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan. Pengintegrasian pelaporan keuangan dan kinerja ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem anggaran berbasis kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Magelang Tahun 2015 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang kepada masyarakat di Kabupaten Magelang secara tertulis. Laporan ini ditujukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan maupun sasaran yang secara tegas telah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2019.

2.1.1. VISI

Memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Magelang pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki serta dengan tetap memperhatikan *motto* Kabupaten Magelang “**Gemah Ripah Iman Cemerlang**”

atau “**Gemilang**” dan Visi Pembangunan kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 maka **Visi Kabupaten Magelang Tahun 2009 - 2014** adalah:

***Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin SEMANAH
(Sejahtera, Maju Dan Amanah)***

Semanah sama dengan sehati, sehingga makna semanah dimaksudkan adanya kebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter Pimpinan Pemerintahan Daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakat Kabupaten Magelang untuk mewujudkan **Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, Maju, dan Amanah (Semanah)**.

Pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun ke depan.

Sejahtera. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Magelang, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil) secara adil dan merata.

Maju. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas.

Amanah. Konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan inisiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya, sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, serta meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

2.1.2. M I S I

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Sehingga secara substansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara administratif tidak menyulitkan pelaksanaannya. Untuk mewujudkan visi pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama. Misi ini di dukung oleh 10 (sepuluh) urusan yaitu:
 - a. Kesehatan;
 - b. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - c. Pendidikan;
 - d. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - e. Perpustakaan;
 - f. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - g. Sosial;
 - h. Kebudayaan;
 - i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Ketransmigrasian.
2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing. Misi ini didukung 9 (sembilan) urusan yaitu :
 - a. Ketenagakerjaan;
 - b. Koperasi dan UKM;
 - c. Penanaman Modal;
 - d. Ketahanan Pangan;
 - e. Pertanian;
 - f. Perikanan;
 - g. Perdagangan;
 - h. Industri;
 - i. Pariwisata.

3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misi ini didukung oleh 4 (empat) urusan yaitu:
 - a. Pekerjaan Umum;
 - b. Perumahan;
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Perhubungan.
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Misi ini didukung oleh 3 (tiga) urusan, yaitu:
 - a. Penataan Ruang;
 - b. Lingkungan Hidup;
 - c. Kehutanan.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Misi ini didukung oleh 7 (tujuh) urusan, yaitu:
 - a. Perencanaan Pembangunan;
 - b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - c. Statistik;
 - d. Kearsipan;
 - e. Komunikasi dan Informatika.
 - f. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. Pertanahan.
6. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat. Misi ini didukung oleh 1 (satu) urusan yaitu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 adalah:

1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang Semakin Meningkat, dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan.
 - b. Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol.
 - c. Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan.

- d. Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Kesempatan Berolah Raga.
 - e. Meningkatnya Penguasaan Iptek dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca.
 - f. Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan.
 - g. Bertambahnya kualitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan berkurangnya kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan berkurangnya jumlah penduduk miskin.
 - h. Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Beragama, Berbudaya, serta Bermoral Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila.
 - i. Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Turut dalam Pembangunan. Adapun indikatornya adalah:
2. Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berbasis pada Potensi Lokal Daerah, dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja.
 - b. Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal.
 - c. Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah.
 - d. Semakin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat. Dengan indikator:
 - e. Menguatnya Kontribusi Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
 - f. Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan.
 - g. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan. Dengan indikator:
 - h. Semakin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah. Dengan indikator:
 - i. Semakin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan, dengan sasaran yaitu:

- a. Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi, dan Mampu Membuka Isolasi Daerah, serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru.
 - b. Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat.
 - c. Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan. Dengan indikator:
 - d. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan. Dengan indikator:
4. Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam.
 - b. Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya. Dengan indikator:
 - c. Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang dapat Mengurangi Resiko Bencana. Dengan indikator:
5. Meningkatnya Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah.
 - b. Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Maksimal.
 - c. Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak.
 - d. Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan.
6. Meningkatnya Kondusivitas dan Keamanan Masyarakat serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya Kondusivitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.
 - b. Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2015 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini pada hakikatnya adalah komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2015.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Magelang Tahun 2015 kami cantumkan dalam lampiran I dari laporan kinerja ini.